

## **Menyelisik Maksud di Balik Fenomen Pemberian Gelar Adat**

Oleh: Andreas Tefa Sa'u dan Anton Camnahas  
(Pemerhati masalah budaya; Tinggal di Ledalero - Flores)

Ada satu fenomena menarik untuk diperhatikan. Setiap kali menjelang pemilu, sering kita dengar praktik penganugerahan berbagai gelar adat kepada tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Gelar-gelar adat itu misalnya Kepala Suku, Tokoh Adat, dan Pelindung Masyarakat Adat. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan, di antaranya, siapa saja yang layak mendapat salah satu gelar adat dari kelompok masyarakat tertentu? Apa alasan di balik pemberian gelar adat tersebut? Apakah praktik seperti ini tidak memberi kesan “melelang” budaya sendiri? Kami tertarik untuk memahami lebih jauh alasan di balik praktik tersebut. Tulisan sederhana ini akan mengambil konteks orang Timor dalam tradisi pemberian gelar adat.

Sebelum menelaah lebih jauh fenomena ini, baiklah terlebih dahulu kita mengenal konsep masyarakat Timor tentang seorang tokoh adat, kepala suku, tamu dan pengkultusan individu. Bagi orang Timor, yang tergolong tokoh adat pada umumnya adalah orang-orang tua yang punya peran dan tanggung jawab khas di dalam masyarakat. Mereka dikenal memiliki kualitas pribadi yang bisa merangkul semua anggota suku lewat kata-kata, sikap dan terlebih lewat kehadiran mereka. Selain memiliki tokoh-tokoh adat, orang Timor juga memiliki kepala-kepala suku. Namun tidak setiap tokoh adat bisa diangkat menjadi kepala suku. Dalam praktiknya, seorang kepala suku dipilih dari dan oleh beberapa marga utama bersama marga-marga bawahannya. Pemangku kepala suku bisa saja seorang yang sudah lebih berumur tetapi bisa juga orang yang masih relatif muda. Hal ini terjadi jika marga-marga utama tidak memiliki orang-orang tua yang bisa dipilih sebagai pemimpin suku. Kendatipun demikian orang muda itu mesti berasal dari kelompok marga utama. Semua ini amat bergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat. Jarang terjadi suku-suku Timor memilih kepala sukunya dari luar lingkup suku sendiri. Alasannya yaitu seorang kepala suku mesti mengetahui secara baik adat istiadat suku-suku yang dipimpinnya. Dia juga mesti hadir secara fisik dan hidup di tengah warganya.

Sebagai orang yang berbudaya, orang Timor juga memiliki tata cara penerimaan seorang tamu. Setiap tamu yang datang akan diterima sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Tata cara penerimaan dilaksanakan dengan simbol-simbol khas budaya setempat. Khusus untuk tamu-tamu resmi ada satu tata cara khusus. Yang lazim dibuat yaitu ketika sang tamu tiba di tempat penerimaan, dia dikalungi dengan selendang adat setempat. Selanjutnya tamu dipersilahkan dan didampingi menuju tempat duduk yang sudah tersedia. Setelah itu *okò-mamà* (sirih-pinang) pun disuguhkan, baik oleh kaum perempuan maupun oleh kaum lelaki. Suguhan itu menjadi pertanda persahabatan, persaudaraan, hormat dan saling menerima satu sama lain. Penerimaan seorang tamu bisa bersifat sederhana seperti disebutkan di atas, tetapi juga bisa bersifat mulia. Tata cara penerimaan mulia ditandai dengan pengenaan pakaian adat seperti kain *beti* (untuk laki-laki) atau kain *tais* (untuk perempuan) dipadukan dengan selendang, destar dan alat-alat perhiasan lain di atas kepala. Hal ini bisa berimplikasi pada pengangkatan seseorang menjadi anggota suku. Dalam kasus khusus, tata cara penerimaan mulia seperti ini bisa juga dilaksanakan dalam penerimaan tokoh-tokoh penting tertentu hanya sebagai ungkapan penghormatan.

Orang Dawan juga mengenal praktik kultus individu. Namun hal ini tidak dipraktikkan di luar lingkup suku sendiri. Kultus individu itu lebih banyak muncul dalam soal kehadiran yang memberi rasa aman, namun lebih cenderung kepada rasa pasti akan sah tidaknya suatu perhelatan adat. Seseorang yang bukan anggota suku bisa diangkat menjadi tokoh adat kalau dia punya jasa tertentu yang sudah pernah dialami secara langsung oleh suku atau sekelompok suku-suku terkait. Sebagai contoh, antara tahun 1989/1990 di Noemuti-Timor, seorang misionaris atas nama Pastor Nikolas van Ammers, SVD (seorang misionaris asal Belanda) diangkat oleh

seluruh pemuka adat di Noemuti sebagai Putra Sulung Noemuti. Gelar ini mempunyai nilai sosial, religius dan budaya yang luar biasa bagi seluruh wilayah suku-suku terkait. Beliau dianugerahi gelar kehormatan ini karena jasa-jasanya di bidang religius. Ia dipandang berjasa membawa pencerahan rohani kepada masyarakat suku-suku dalam wilayah itu agar beriman secara benar. Dari segi sosial budaya, beliau sangat menghargai bahasa masyarakat suku-suku itu dan menggunakannya bukan hanya dalam komunikasi biasa tetapi juga dalam urusan pembinaan-pembinaan rohani dan perayaan religius. Selain itu, beliau juga mempunyai kualitas kepribadian tertentu yang dipancarkan lewat cara hidup dan cara membina relasi sosial. Kualitas-kualitas inilah yang telah menjadi dasar pertimbangan pemberian gelar Putera Sulung dalam wilayah budaya Noemuti. Hal ini terjadi setelah van Ammers hidup dan berkarya di daerah itu lebih dari 50 tahun.

Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pusat/Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), maaf kalau kami keliru, Letjen (purn) Prabowo Subianto, dinobatkan menjadi tokoh pelindung masyarakat adat di Timor. Gelar ini diberikan oleh masyarakat adat kabupaten Belu, TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang (bdk. PK, 31/1/2009). Sehari sebelumnya, Pos Kupang menurunkan satu tulisan bahwa Prabowo Subianto, dikukuhkan menjadi tokoh adat Timor pada hari Kamis 29 Januari 2009 (bdk. PK, 30/1/2009). Dengan demikian, gelar pelindung masyarakat adat di Timor merupakan perbaikan atas tulisan sebelumnya. Terlepas dari gelar apa pun yang diberi kepadanya, yang pasti, praktik itu memiliki tujuan tertentu. Yang tahu pasti tujuan sesungguhnya adalah masyarakat pemberi gelar/pakaian adat kepada sang tamu.

Tanpa bermaksud meremehkan tujuan luhur di balik maksud berbagai masyarakat adat di Timor, injinkanlah kami mereka-reka berbagai alasan yang ada dalam benak para penggagas pemberian gelar adat tersebut. *Pertama*, praktik ini merupakan ungkapan keramah-tamahan berbagai masyarakat adat di Timor terhadap Prabowo. Kalau ini yang terjadi, maka Prabowo telah diterima sebagai seorang tokoh penting dengan hati terbuka dan penuh keramah-tamahan. *Alasan kedua* yang bisa disebut yaitu anugerah itu merupakan ungkapan penghargaan atas jasa-jasa Prabowo selama ini terhadap masyarakat adat di Timor. Hal ini tampak dari gelar luar biasa yang diberi kepadanya yaitu sebagai tokoh pelindung masyarakat adat di Timor. Di sini kita melihat bahwa masyarakat adat di Timor merasa bisa menemukan tempat berlindung pada Prabowo. *Alasan ketiga*, sebagaimana kita ketahui bersama, Gerindra yang adalah satu partai baru kelihatan berharap banyak dari masyarakat di Timor (NTT) untuk pemilu yang kian mendekat. Karena itu, praktik penganugerahan gelar adat ini mungkin tidak lebih dari satu reklame politis untuk menarik simpati massa pemilih. Namanya juga reklame sehingga mesti dikemas sebagus mungkin agar bisa menarik perhatian. *Alasan keempat*, berbagai masyarakat adat di Timor mempunyai kebiasaan untuk menyanjung pribadi-pribadi tertentu yang memiliki status sosial dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan lewat simbolisasi pengenaan pakaian kebesaran layaknya seorang raja di Timor. Pada kesempatan itu, “sang tokoh” diberi pakaian kebesaran seorang tokoh adat Timor berupa kain sarung, kalung yang terbuat dari perak, mahkota raja lengkap dengan tas kerajaan. Semua ini sangat mungkin terjadi karena orang-orang Timor mengenal praktik-praktik seperti itu dalam budaya mereka.

Apa pun alasan di balik praktik itu, hemat kami, hal ini perlu dibicarakan lebih jauh. Praktik ini meninggalkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Persaingan banyak parpol dalam merebut simpati massa menjelang pemilu bisa memaksa mereka memanfaatkan berbagai cara. Ritual adat juga bisa dimanipulasi untuk maksud-maksud politis seperti itu. Sayang kalau memang pemberian gelar itu adalah untuk tujuan politis tertentu. Menurut kami, ungkapan hormat dan keramahan itu tidak mesti dinyatakan dengan pemberian gelar adat. Satu acara penyambutan tanpa penganugerahan gelar adat sekalipun tidak akan mengurangi keramahan kita kalau memang dilakukan

dengan tulus. Ketika budaya dipakai sebagai alat, sebenarnya kita sedang mempermainkan budaya sendiri. Kita menganggap budaya kita murahan sehingga gelar-gelar adat yang kita miliki bisa dengan gampang diberikan kepada orang-orang di luar suku sendiri. Dalam arti tertentu, praktik seperti ini dapat disebut sebagai pemerosotan nilai-nilai luhur budaya sendiri demi satu tujuan sesaat. Apalagi tujuan itu bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat adat tetapi untuk interese beberapa orang tertentu saja.

Bapak Prabowo memang sudah dinobatkan oleh masyarakat adat di empat kabupaten di Timor (Barat). Kita bertanya, masyarakat adat mana di Belu, TTU, TTS dan Kupang? Yang jelas tidak mungkin seluruh masyarakat adat di keempat kabupaten ini sepaham dengan pemberian gelar tersebut. Tentu saja beralasan kalau kami berharap agar seseorang yang diberi gelar adat tertentu didasarkan pada kriteria-kriteria yang masuk akal dan bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat adat pemilik budaya tersebut. Pengetahuan adat istiadat setempat dan jasa-jasa si penerima yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bisa dijadikan sebagai satu-dua kriteria dasar pertimbangan. Dengan ini kami mau mengatakan bahwa pemberian gelar adat tertentu sekedar sebagai satu ungkapan penghormatan rasanya berlebihan dan terkesan “royal” dengan kekayaan budaya sendiri.

Sejak Kamis 29 Januari 2009 yang lalu, masyarakat adat di Timor telah memiliki seorang tokoh pelindung. Kita bertanya, sudah sejauh mana berbagai masyarakat adat di Timor terancam keberadaannya sehingga membutuhkan perlindungan? Kalau masyarakat adat di Timor terancam oleh berbagai masalah kehidupan, apakah perlindungan seperti yang diharapkan itu bisa efektif? Jangan sampai sebaliknya, justru orang-orang yang diberi gelar “pelindung”-lah yang sedang mencari perlindungan dari masyarakat adat setempat untuk mengamankan sebuah maksud tersembunyi.

Semua pertanyaan ini hanya bisa dijawab secara tepat oleh semua pihak yang terlibat. Yang pasti, anugerah gelar adat yang tulus itu mesti disikapi secara proporsional oleh orang yang menerimanya. Gelar adat itu sesungguhnya mempunyai dua aspek penting sekaligus yaitu anugerah dan tanggung jawab. Selain sebagai satu ungkapan persaudaraan dan rasa hormat, ia mengandung dalam dirinya satu tanggung jawab moral. Semoga para penerima gelar adat, tidak melupakan tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat pemberi gelar tersebut.